BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis terhadap kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Padang berada pada kriteria instruktif. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Kemandirian pemerintah daerah Kota Padang berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang tahun anggaran 2010-2014 yang diperoleh berdasarkan pengolahan data dari Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Padang tahun anggaran 2010-2014 sebesar 15,42%.
- Mengingat peran pemerintah pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Padang masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun terakhir yang hanya sebesar 13,32%. Artinya, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang kecil kepada pemerintah daerah Kota Padang dalam menjalankan pembangunan daerahnya.

- 3. Tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Padang dapat dikatakan cukup efektif dan sangat efisien. Hal ini terlihat dari tingginya angka rata-rata Rasio Efektivitas sebesar 98,21% dan rendahnya angka rata-rata Rasio Efisiensi sebesar 3,34% selama 5 tahun anggaran terakhir. Artinya, pemerintah daerah Kota Padang telah melakukan upaya yang cukup efektif dan sangat efisien dalam mengelola keuangan daerahnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, RSITAS ANDALAS
- 4. Perhitungan dan analisis terhadap Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antara belanja telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Tidak Langsung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kota Padang, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Potensi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang

- merupakan penopang utama dalam meningkatkan PAD akan semakin meningkat.
- 2. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah sebaiknya memberikan informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan.
- 3. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

 Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah saja yaitu Kota Padang.

KEDJAJAAN

- 2. Dalam penelitian ini hanya digunakan 5 (lima) rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara masih banyak rasio atau pengukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Penelitian ini hanya menggunakan data keuangan daerah tahun anggaran
 2010-2014 dikarenakan data terbaru tahun 2015 belum dapat diperoleh melalui BPKA Kota Padang.